

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2009.
- Afrizal, T. (2024). The criminal acts of corruption as extraordinary crimes in indonesia. *IJLSH*, 1(1), 27-37. <https://doi.org/10.70193/ijlsh.v1i1.141>
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Andi, Hamzah. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Beer, Michael, and Nitin Nohria. *Breaking the Code of Change*. Boston: Harvard Business School Press, 2000.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Corrupt Practices Investigation Bureau Singapore. "Annual Report 2020." Singapore, 2021.
- Effendy, Marwan. *Korupsi Dan Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*. Jakarta: Referensi, 2018.
- Ermansjah Djaja. *Memberantas Korupsi Bersama KPK: Norma, Teori Dan Penerapannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- . *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2020.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Hajairin et al., "Lima faktor efektivitas hukum menurut Soekanto," *Jurnal Sosiologi Hukum* (2022);
- Independent Commission Against Corruption Hong Kong. "Annual Report 2020." Hong Kong, 2021.
- James Q. Wilson, Bureaucracy. *What Government Agencies Do and Why*

- They Do It*. New York: Basic Books, 1989.
- Jean-Pierre Brun. *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners*. Washington DC: World Bank Publications, 2011.
- Karianga, H. (2024). State financial corruption and its impact on development. *Revista De Gestão Social E Ambiental*, 18(9), e05133. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n9-027>
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. "Laporan Kinerja Penanganan Perkara Korupsi Tahun 2023," 2023.
- Kevin M. Stephenson. "Barriers to Asset Recovery: An Analysis of the Key Legal and Practical Obstacles to the Recovery of Stolen Assets." World Bank, 2011.
- Kholis, E.L. *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*. Depok: Solusi Publishing, 2010.
- Lathif, N. (2017). Teori hukum sebagai sarana alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat. *Palar | Pakuan Law Review*, 3(1). <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>
- Lawrence M., Friedman. *How Law Affects Behavior*. Cambridge: Harvard University Press, 2016.
- . *Law and Society: An Introduction*. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1977.
- . "Legal Culture and Social Development." *Law & Society Review* 04, no. 1 (1969).
- Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1993.
- Mark Pieth. *Recovering Stolen Assets: A Study on Systems of Civil Forfeiture*. Basel Institute on Governance, 2008.
- Marwan Effendy. *Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Paolo Mauro. "Corruption and Economic Growth", *The Quarterly Journal of Economics*. 1995 110, no. 3 (n.d.).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada

Media Group, 2017.

Ramayanti, H. and Lubis, A. (2023). Peran hukum dalam mengatasi serangan cyber yang mengancam keamanan nasional. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2(09). <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.672>

Robert S, Kaplan, and Norton David P. *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action*. Boston: Harvard Business School Press, 1996.

Romli, Atmasasmita. *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*. Mandar Maju, 2019.

———. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2011.

———. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta. Kencana, 2011.

———. *Strategi Dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Kencana, 2019.

Schein, Edgar H. *The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization*. New York: Doubleday, 2010.

Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.

Tanzi, Vito, and Davoodi Hamid. *Corruption, Public Investment, and Growth*. IMF Working Paper, 1997.

Tim Icw. "Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I Tahun 2022No," 2022.

Transparency International. "Global Corruption Report 2022." Sport, Berlin, 2022.

Tim Penyusun Kejaksaan Republik Indonesia. *Buku II Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi*. Jakarta, 2024,

UNODC. "State of Implementation of the United Nations Convention against Corruption: Criminalization, Law Enforcement and International Cooperation." Vienna: UNODC, 2021.

World Bank. *Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank*. Washington DC: World Bank Publications, 2007.

Jurnal

- Auliya, R., Gaol, S., & Darwis, N. (2024). Pandangan mahkamah agung republik indonesia tentang disparitas putusan pemidanaan perbuatan melanggar hukum yang merugikan keuangan negara. *Iblam Law Review*, 4(1), 99-112. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.160>
- Ayu, M. E., & Putri, S. A. "Perdagangan Perempuan Dan Anak Serta Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir Berdasarkan Konvensi Palermo". *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3, No.1, 2018, 61-72.
- Baharuddin Badaru, & Siswandi. "Efektivitas Kejaksanaan dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi". *Journal of Lex Theory*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 214.
- Bahri, M. S., Marwiyah, S., Prawesthi, W., & Amiq, B. "Mekanisme Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi". *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2024, 300-313.
- Batubara, S. A. "Urgensi Civil Forfeiture Untuk Meningkatkan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara". *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, Vol. 1, No. 2, 2018, 353-363.
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. "Urgensi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi". *Law Reform*, Vol. 15, No. 1, 2019, 85-97.
- Dalimunthe, J. S. "Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang dikuasai Pihak Ketiga". *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 1, No. 2, 2020, 64-81.
- Effendi, E. "Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda". *Jurnal Usm Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2022, 618-632.
- Faqih, "Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto," **Jurnal Teori Hukum** (2024).
- Febriani, S., & Lasmadi, S. "Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti". *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2020, 1-22.
- Junaedi, J. "Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Penuntut Umum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Studi Pada Kejaksaaan Tinggi Sulawesi Barat". *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol. 2, No. 2, 2021, 148-161.
- Minkkinen, P. (2005). Why is law a normative discipline? on hans kelsen's 'normology'. *Res Publica*, 11(3), 235-249. <https://doi.org/10.1007/s11158-005-1484-5>
- Muhammad Akbar, Hambali Thalib, & Sri Lestari Poernomo. "Efektivitas

- Kewenangan Kejaksaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Akibat Kerugian Negara". *Journal of Lex Philosophy*, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 562
- Muhammad Irvan, Hambali Thalib, & Baharuddin Badaru. "Efektivitas Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan". *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol.3, No. 7, 2022, hlm. 1237-1238.
- Murphy, K., Tyler, T., & Curtis, A. (2009). Nurturing regulatory compliance: is procedural justice effective when people question the legitimacy of the law?. *Regulation & Governance*, 3(1), 1-26. <https://doi.org/10.1111/j.1748-5991.2009.01043.x>
- Murwiyanto, "Efektivitas Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pengembalian Kerugian Negara", Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015, hlm. 134-135
- Nurhayati, R., & Gumbira, S. W. "Pertanggungjawaban Publik dan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 1, 2017, 41-66.
- PANJAITAN, A. (2024). Optimalisasi peran pihak ketiga yang berkepentingan dalam praperadilan melalui penegakan hukum menuju pembaharuan hukum acara pidana. *EAEBJOL*, 1(2). <https://doi.org/10.61511/eaebjol.v1i2.2024.294>
- Puteri Kencana Surya Erlangga, Mulyono, & Fauziah. "Efektivitas Peran Kejaksaan dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Korupsi melalui Pelaksanaan Putusan Pengadilan". *Jurisdictie*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 151-152
- Putu Nadya Putri, & Ni Putu Anik Prawati, "Implementasi Penyitaan Aset Negara oleh Kejaksaan Akibat Tindak Pidana Korupsi: Guna Memulihkan Kerugian Negara", *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, Vol. 3, No. 2, 2025.
- Samekto, F. (2019). Menelusuri akar pemikiran Hans Kelsen tentang *stufenbeuthetheorie* dalam pendekatan normatif-filosofis. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>
- Setiadi, W. (2010). Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 7(3), 309-322
- Siswandi, S., Sampara, S., & Badaru, B. (2020). Efektivitas kejaksaan dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. *Journal of Lex Theory (Jlt)*, 1(2), 213-227.

<https://doi.org/10.52103/jlt.v1i2.263>

- Subroto, S. (2014). Legislasi mahkamah konstitusi dalam putusan mahkamah konstitusi nomor: 46/puu-viii/2010 ditinjau dari teori hukum hans kelsen tentang konstitusi. *Justicia Islamica*, 11(2). <https://doi.org/10.21154/justicia.v1i2.103>
- Suhariyanto, B. (2016). Restoratif justice dalam pemidanaan korporasi pelaku korupsi demi optimalisasi pengembalian kerugian negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(3), 395-412.
- Surohmat, S. (2023). Mafia hukum dalam perspektif keberlangsungan dan penegakan hukum. *Al-Qisth Law Review*, 7(1), 20. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.20-42>
- Tarigan, B. "Polemik Pasal 3 Uu No. 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor Mengenai Unsur Niat Jahat Dan Memperkaya Diri Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Justiqqa*, Vol. 2, No. 1, 2020, 27-39.
- Thalib, H., Ramadhan, A., & Djanggih, H. "The Corruption Investigation In The Regional Police of Riau Islands, Indonesia". *Rechtsidee*, Vol. 4, No. 1, 2017, 71-86.
- Widodo, W., Darmawan, R., & Narindro, A. (2024). Penghitungan proporsi kerugian pada pendapatan negara berdasarkan kualifikasi kesengajaan dan kualifikasi perbuatan pelaku tindak pidana di bidang perpajakan. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(4), 2308-2321. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i4.15283>
- Yoga, I. (2023). Penegakan hukum dalam menangani pencemaran lingkungan di pesisir pantai bali. *Belom Bahadat*, 13(2), 1-14. <https://doi.org/10.33363/bb.v13i2.1068>
- Yudho, W. and Tjandrasari, H. (2017). Efektivitas hukum dalam masyarakat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 17(1), 57. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1227>
- Yuliana, T., Sudarmanto, E., & Priyana, Y. (2023). Efektivitas peran penegak hukum dalam penanggulangan korupsi di provinsi jawa barat. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2(11), 1065-1072. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.797>
- Yusuf, M., Zulyadi, R., & Isnaini, I. (2023). Efektivitas penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana dengan korban anak pada wilayah hukum kepolisian resor sibolga. *Journal of Education Humaniora and Social Sciences (Jehss)*, 5(4), 3306-3318. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1685>

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI). (2025, 23 September). Paripurna Tetapkan RUU Perampasan Aset Masuk Bersama 51 RUU Prioritas Prolegnas 2025-2026.

<https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/59616/t/Paripurna%2BTetapkan%2BRUU%2BPerampasan%2BAset%2BMasuk%2BBersama%2B51%2BRUU%2BPrioritas%2BProlegnas%2B2025-2026%2BLainnya>

KPK: Pengesahan RUU Perampasan Aset, Percepat Pemulihan Kerugian Keuangan Negara. <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-pengesahan-ruu-perampasan-aset-percepat-pemulihan-kerugian-keuangan-negara> diakses pada 27 desember 2025